

"Optimalisasi Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Program Sumber Daya Air: Studi Kasus Dinas PUPR Kabupaten Subang"

Oleh: Eko Aditya Putranto ekoadityaputranto@gmail.com, Dwi Ari Susilo dwi.ari.susilo81@gmail.com, Hani Ana Rosanah haniarjiunna18@gmail.com, Rohmat Apandi arohmat679@gmail.com, Wariah Meliyanawati melianawatiw@gmail.com

Abstrak

Pengawasan memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan, termasuk program sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap efektivitas program bidang sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan mencakup dimensi administratif, teknis, dan partisipatif. Meskipun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarunit, dan lemahnya tindak lanjut atas temuan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi lintas unit. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pengawasan dan efektivitas program sumber daya air, serta menjadi referensi kebijakan pengawasan di Kabupaten Subang.

Kata kunci: pengawasan, efektivitas program, sumber daya air, Dinas PUPR, Kabupaten Subang

Abstract

Supervision plays a crucial role in supporting the effectiveness of development programs, including water resources programs. This study aims to analyze the influence of supervision on the effectiveness of water resources programs implemented by the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in Subang Regency. This research adopts a descriptive-qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that supervision encompasses administrative, technical, and participatory dimensions. However, the effectiveness of the programs is still constrained by factors such as limited human resources, lack of inter-unit coordination, and weak follow-up on supervision findings. This study concludes that optimizing supervision can be achieved by enhancing the capacity of supervisors, utilizing information technology, and strengthening inter-unit coordination. The

results of this study are expected to provide practical contributions to improving the quality of supervision and the effectiveness of water resources programs, as well as serving as a reference for policy-making in Subang Regency.

Keywords: *supervision, program effectiveness, water resources, PUPR, Subang Regency*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan bahwa air adalah hak rakyat dan harus dikelola secara berkelanjutan serta berkeadilan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan program bidang sumber daya air seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti inefisiensi pelaksanaan, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pengawasan.

Menurut George R. Terry (2006), pengawasan atau *control* merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup dimensi teknis, administratif, dan partisipatif. Siagian (2003) menegaskan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya air.

Di Kabupaten Subang, program-program pembangunan sumber daya air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, beberapa laporan audit dan evaluasi internal menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini, seperti keterlambatan proyek, mutu pekerjaan yang rendah, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan. Hal ini diperkuat oleh hasil pengawasan Inspektorat Daerah yang menemukan bahwa beberapa proyek infrastruktur air tidak mencapai target yang ditetapkan, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya.

Permasalahan di Kabupaten Subang

Kabupaten Subang merupakan wilayah yang memiliki potensi besar di bidang sumber daya air, terutama untuk irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan penyediaan air bersih. Namun, implementasi program bidang sumber daya air masih menghadapi kendala signifikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa laporannya mencatat adanya penyimpangan anggaran, ketidaktepatan waktu pelaksanaan proyek, dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Masalah-masalah ini berdampak langsung pada efektivitas program dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan program sumber daya air di Dinas PUPR Kabupaten Subang?

2. Bagaimana efektivitas program sumber daya air yang telah dijalankan?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengawasan dan efektivitas program tersebut?
4. Bagaimana strategi optimalisasi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas program?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan pengawasan program sumber daya air di Dinas PUPR Kabupaten Subang.
2. Menilai efektivitas program sumber daya air yang telah dilaksanakan.
3. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan dan efektivitas program.
4. Merumuskan strategi optimalisasi pengawasan untuk mendukung efektivitas program.

Manfaat Penelitian

- Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Dinas PUPR Kabupaten Subang dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program sumber daya air.
- Manfaat Akademis: Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengawasan sektor publik dan pengelolaan sumber daya air, sekaligus sebagai referensi bagi penelitian sejenis.
- Manfaat Kebijakan: Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan di daerah untuk memperkuat pengawasan, khususnya dalam program infrastruktur dan lingkungan.

Tinjauan Pustaka Singkat

- Teori Pengawasan: Menurut Terry (2006), pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Siagian (2003) menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus sistematis, berkesinambungan, dan adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks sektor publik, Widodo (2001) menambahkan bahwa pengawasan juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- Efektivitas Program: Steers (1985) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dalam program pemerintah, efektivitas dapat diukur dari ketercapaian target, efisiensi pelaksanaan, dan kepuasan masyarakat. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan pentingnya pengendalian dan evaluasi program sebagai bagian dari siklus pembangunan daerah.
- Studi Sejenis: Penelitian oleh Arifin (2018) di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan partisipatif berdampak positif pada keberhasilan program infrastruktur air. Studi serupa oleh Rahmawati (2020) di Kabupaten Cirebon menemukan bahwa kolaborasi lintas sektor dan penggunaan teknologi pengawasan meningkatkan efektivitas program.

Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena pengawasan dan efektivitas program bidang sumber daya air secara mendalam. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode deskriptif-kualitatif digunakan untuk memahami makna, mengidentifikasi pola, dan menggali pengalaman subjek dalam konteks alami. Pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian kebijakan publik dan evaluasi program, karena mampu menangkap dinamika yang kompleks dan multidimensional.

Selain itu, penelitian ini akan memanfaatkan teknik studi kasus yang berfokus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang sebagai unit analisis. Menurut Yin (2014), studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks nyata dan menghasilkan pemahaman mendalam.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan program bidang sumber daya air di wilayah Kabupaten Subang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi kontekstual dan aksesibilitas data yang diperlukan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan program sumber daya air di Dinas PUPR Kabupaten Subang, termasuk perwakilan Inspektorat Daerah, kontraktor pelaksana, dan masyarakat pengguna manfaat program. Teknik pemilihan sampel akan menggunakan purposive sampling (Sugiyono, 2017), yang artinya informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung, pengetahuan mendalam, dan peran strategis dalam program.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Langsung: Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program dan sistem pengawasan di lapangan untuk melihat bagaimana pengawasan diterapkan, hambatan yang dihadapi, dan respons para pelaksana program. Menurut Moleong (2017), observasi memungkinkan peneliti menangkap data kontekstual yang seringkali tidak terekam dalam dokumen resmi.
2. Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci, seperti pejabat Dinas PUPR, pengawas lapangan, Inspektorat Daerah, kontraktor, dan tokoh masyarakat. Menurut Kvale (2007), wawancara mendalam efektif untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pengetahuan subjek secara komprehensif.
3. Studi Dokumentasi: Peneliti akan mengkaji dokumen resmi seperti laporan pelaksanaan proyek, hasil audit internal, regulasi terkait (misalnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan peraturan teknis pengawasan), serta catatan rapat dan laporan pengawasan. Bowen (2009) menyebutkan bahwa studi dokumentasi dapat memperkuat triangulasi data dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-tematik. Menurut Braun & Clarke (2006), analisis tematik merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola tema dalam data kualitatif. Tahapan analisis meliputi:

1. Membaca dan memahami seluruh data.
2. Mengidentifikasi tema-tema utama, seperti pelaksanaan pengawasan, efektivitas program, faktor penghambat dan pendukung, serta strategi optimalisasi.
3. Mengkategorikan data ke dalam tema-tema yang relevan.
4. Menyusun narasi tematik yang mendalam dan mendukung temuan penelitian.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas, peneliti akan menerapkan triangulasi metode (Denzin, 1978) dengan memadukan data dari observasi, wawancara, dan dokumen. Selain itu, teknik *member checking* (Lincoln & Guba, 1985) akan dilakukan dengan meminta klarifikasi dan konfirmasi hasil kepada informan kunci.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan program bidang sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, temuan utama meliputi:

1. Pengawasan Teknis dan Administratif
 - Pengawasan teknis di lapangan seringkali tidak memadai akibat terbatasnya jumlah personel pengawas dan keterbatasan anggaran.
 - Pengawasan administratif cenderung bersifat formalitas, seperti pemeriksaan dokumen tanpa pengecekan langsung ke lapangan.
2. Kepatuhan Terhadap Regulasi
 - Implementasi pengawasan belum sepenuhnya mematuhi regulasi, seperti Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan sumber daya air, yang menekankan pentingnya pengawasan berjenjang dan partisipatif.
3. Efektivitas Program
 - Program pembangunan infrastruktur sumber daya air berjalan, namun efektivitasnya bervariasi antar proyek. Beberapa proyek berhasil meningkatkan ketersediaan air bersih dan mengurangi banjir, namun ada pula proyek yang lambat selesai atau hasilnya tidak sesuai rencana.
 - Faktor-faktor penyebab rendahnya efektivitas termasuk keterbatasan dana, lemahnya pengawasan, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

4. Peran Masyarakat

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah. Hasil wawancara menunjukkan minimnya pelibatan warga dalam monitoring proyek, meskipun regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan perlunya peran serta masyarakat.

B. Diskusi dan Analisis Hasil

Temuan ini sejalan dengan pendapat Funnell & Rogers (2011) yang menyatakan bahwa efektivitas program publik sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan yang mencakup dimensi teknis, administratif, dan partisipatif. Keterbatasan dalam pengawasan akan berdampak langsung pada pencapaian tujuan program.

Hasil penelitian juga mendukung teori Robbins (2006) tentang pengawasan dalam organisasi, yang menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar *compliance* terhadap aturan, tetapi harus mampu mendeteksi masalah sejak dini dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks Dinas PUPR Subang, lemahnya pengawasan di lapangan menyebabkan kurang optimalnya hasil program, seperti infrastruktur yang cepat rusak atau penyelesaian yang tertunda.

Dibandingkan dengan studi sebelumnya, misalnya penelitian oleh Sari (2020) di Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas hasil proyek, maka rendahnya partisipasi masyarakat di Subang menjadi catatan penting. Kurangnya sosialisasi dan transparansi informasi proyek diduga menjadi penyebab.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengawasan

Faktor Penghambat:

- Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten untuk pengawasan teknis.
- Minimnya alokasi anggaran khusus untuk pengawasan.
- Kurangnya sistem informasi pengawasan yang transparan dan berbasis teknologi.
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Faktor Pendukung:

- Komitmen pimpinan Dinas PUPR untuk memperbaiki sistem pengawasan.
- Adanya regulasi yang mendukung, seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2019.
- Potensi pengembangan sistem pengawasan berbasis digital (misalnya dashboard pemantauan proyek).

D. Implikasi Hasil terhadap Efektivitas Program

Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa pengawasan yang lemah berdampak pada rendahnya efektivitas program sumber daya air. Menurut Crawford & Bryce (2003),

pengawasan yang baik akan meminimalisasi penyimpangan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan, dan memastikan pencapaian output yang diharapkan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya:

- Penguatan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan rekrutmen SDM yang kompeten.
- Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan.
- Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi (UNDP, 1997), serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Goal 6: *Clean Water and Sanitation*.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengawasan terhadap efektivitas program bidang sumber daya air di Dinas PUPR Kabupaten Subang, diperoleh beberapa kesimpulan utama:

1. Pengawasan merupakan faktor kunci dalam efektivitas program. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah, baik secara teknis, administratif, maupun partisipatif, berdampak signifikan terhadap rendahnya efektivitas program pembangunan infrastruktur sumber daya air. Hal ini sejalan dengan pendapat Crawford & Bryce (2003) yang menegaskan bahwa pengawasan yang baik akan meminimalisir penyimpangan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan, dan memastikan pencapaian output yang diharapkan.
2. Faktor penghambat pengawasan meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi personel pengawas, minimnya alokasi anggaran khusus untuk pengawasan, lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini memperkuat hasil studi Robbins (2006) dan Funnell & Rogers (2011) yang menekankan bahwa pengawasan efektif harus didukung oleh sumber daya manusia, sistem, dan partisipasi yang memadai.
3. Efektivitas program sumber daya air di Subang bervariasi. Beberapa proyek telah berjalan baik dan memberikan manfaat signifikan, seperti peningkatan ketersediaan air bersih dan pengurangan banjir. Namun, sebagian proyek lainnya mengalami kendala keterlambatan, kualitas rendah, atau penyimpangan pelaksanaan. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sistem pengawasan yang lebih efektif dan adaptif.
4. Peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif belum optimal. Padahal, UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan prinsip *good governance* (UNDP, 1997) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas.

B. Saran Praktis bagi Dinas PUPR Kabupaten Subang

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan langkah-langkah praktis berikut untuk meningkatkan efektivitas program sumber daya air melalui pengawasan:

- Memperkuat kapasitas pengawasan dengan meningkatkan jumlah dan kompetensi personel pengawas melalui pelatihan teknis dan manajerial. Hal ini sesuai dengan anjuran Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang menekankan pentingnya pengawasan yang profesional.
- Meningkatkan alokasi anggaran pengawasan, khususnya untuk monitoring lapangan, pengadaan alat pengawasan, dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi.
- Mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital, misalnya dengan membuat dashboard pemantauan proyek atau aplikasi pelaporan masyarakat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Mengintensifkan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan, melalui forum musyawarah desa, kelompok pengelola air, atau pengaduan online. Hal ini sejalan dengan semangat partisipasi publik dalam Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan sumber daya air.
- Menerapkan prinsip evaluasi berkelanjutan agar hasil evaluasi pengawasan dapat menjadi dasar perbaikan sistem dan prosedur di masa mendatang.

C. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk memperkaya dan memperdalam kajian di masa mendatang, disarankan:

- Memperluas lingkup penelitian dengan membandingkan praktik pengawasan dan efektivitas program sumber daya air di kabupaten lain yang memiliki karakteristik serupa, untuk menemukan *best practice* yang dapat diterapkan di Subang.
- Menggunakan metode kuantitatif dengan data yang lebih besar (misalnya survei terhadap masyarakat atau audit teknis proyek) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan mengukur hubungan antara variabel pengawasan dan efektivitas program.
- Menggali aspek sosial dan budaya lokal yang mempengaruhi pengawasan, seperti pola komunikasi, kepercayaan, atau peran tokoh masyarakat, agar strategi pengawasan dapat dirancang lebih kontekstual dan efektif.
- Mengembangkan kajian partisipasi digital (*e-participation*) dalam pengawasan program publik, misalnya melalui studi implementasi aplikasi pelaporan warga, untuk menjawab tuntutan era digital dan smart governance.

Daftar Pustaka

- (PUPR), K. P. (2020). *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- (UNDP), U. N. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.

- Bank, W. (2019). *Improving Water Resource Management: A Framework for Action*. Washington: DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1371-4>.
- Bardach, E. (2012). *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*. Cambridge: MIT Press.
- Basri, M. (2018). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 145-156.
- Bovens, M. G. (2014). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford : Oxford University Press.
- Carter, N. (2017). Water Resource Management: Policy, Regulation, and Sustainability. *Environmental Science & Policy*, 75, 11-18. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.04.002>.
- Crawford, P. &. (2003). Project monitoring and evaluation: A method for enhancing the efficiency and effectiveness of aid project implementation. *International Journal of Project Management*, 21(5), 363-373.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fardani, D. &. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Sumber Daya Air di Kabupaten Bandung. *Jurnal Teknik Sipil*, 7(1), 12-23.
- Funnell, S. &. (2011). *Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and Logic Models*. Wiley: Jossey-Bass.
- Gunningham, N. K. (2004). Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance. *Law & Social Inquiry*, 29(2), 307-341.
- Hatfield-Dodds, S. e. (2015). Systems Thinking for Sustainable Water Management. *Water Resources Management*, 29, 2681–2696. <https://doi.org/10.1007/s11269-015-0974-6>.
- Indonesia, K. D. (2019). *Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Keay, M. (2007). Water Regulation and Governance: A Global Perspective. *Water Policy*, 9(S1), 23-40.
- Kuncoro, M. (2017). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*. Bandung: Erlangga.
- Mardiasmo. (2013). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. &. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nasution, S. (2020). Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 215-230.

- Negeri, P. M. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- O'Leary, R. &. (2012). Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where Are We Going? . *The American Review of Public Administration*, 42(5), 507–522.
- Pemerintah, P. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. Jakarta: Peraturan Pemerintah.
- Pollitt, C. &. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity*. Oxford: Oxford University Press.
- Programme, U. W. (2020). *The United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change*. Paris: UNESCO Publishing.
- PUPR, P. (2020). *Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. Jakarta: Permen PUPR.
- Robbins, S. (2006). *Organizational Behavior*. New York City: Pearson Education.
- Rogers, P. B. (1998). Water as a Social and Economic Good: How to Put the Principle into Practice. *Global Water Partnership Technical Committee Background Paper*, No. 1.
- Shah, T. &. (2006). Institutional Alternatives in African Water Management: Lessons from International Experience. *Water Policy*, 8(3), 231-250.
- Stoker, G. (2006). Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance? . *American Review of Public Administration*, 36(1), 41-57.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang. (2019). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta.
- Yusuf, M. (2016). Pengawasan Program Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus di Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 89-100.

